

**PENGARUH PENGAWASAN, PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP
KINERJA UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
(DPPKAD) Se-Ekskarisidenan Surakarta)**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhamadiyah Surakarta

Oleh:

FAUZY ARDY NUGROHO
B 200 090 098

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013**

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

PENGARUH PENGAWASAN, PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Se-Ekskarisidenan Surakarta)

Yang ditulis oleh :

FAUZY ARDY NUGROHO

B 200 090 098

Penandatangan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta,

2013

Pembimbing

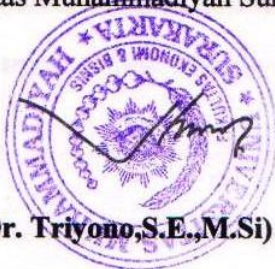


(Banu Witono, SE, M.Si)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, S.E., M.Si)

**PENGARUH PENGAWASAN, PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP
KINERJA UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
(DPPKAD) Se-Ekskarisidenan Surakarta)**

Oleh:

Fauzy Ardy Nugroho

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi kasus dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) Se Ekskarisidenan surakarta)

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian dengan metode survey, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan kuesioner. Penelitian dilaksanakan terhadap pegawai dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Se Ekskarisidenan surakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 66 responden. Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel anggota populasi yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu.

Dari penelitian yang dilaksanakan diperoleh hasil uji t sebagai berikut : H_1 untuk variabel pengawasan adalah sebesar $0,005 < 0,05$ jadi H_1 diterima, pengawasan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. H_2 untuk variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan adalah sebesar $0,037 < 0,05$ jadi H_2 diterima, pemahaman sistem akuntansi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. H_3 untuk variabel pengelolaan keuangan adalah sebesar $0,038 < 0,05$ jadi H_4 diterima, pengelolaan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja.

Kata Kunci : Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Pengelolaan Keuangan, Kinerja

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengukuran dan penilaian suatu kinerja pemerintah pada umumnya merupakan hal yang sangat penting atau vital karena peningkatan kualitas dan comparability informasi keuangan pemerintah menjadi tugas yang sangat penting. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan satuan organisasi atau kerja akan lebih dilihat dari kemampuannya, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya, untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam rencana strategik. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk didalamnya informasi atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan barang dan jasa (seberapa baik suatu barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan, dan sejauh mana pelanggan merasakan kepuasan atas barang dan jasa yang diberikan): hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan (Robertson2002 dalam Fachruzzaman dan Norman, 2010).

Pelaksanaan sistem pengukuran kinerja ini telah diatur melalui intruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/ IX/ 6/ 1999 tentang pedoman penyusunan Pelaporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah, yang telah diperbaiki dengan Keputusan LAN Nomor 239/ IX/ 6/ 8/ 2003. Kemampuan system pengukuran kinerja untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ternyata masih sering dipertanyakan, baik diluar negeri maupun di Indonesia. Hal ini akibat dari banyaknya penelitian yang menunjukkan bahwa adanya masalah dalam implementasi system pengukuran kinerja ini (Fachruzzaman dan Norman, 2010).

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, diperlukan system pengelolaan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan system desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal ini

diperlukan suatu pemikiran yang cerdas melalui inovasi system akuntansi. (Bastian dan Soepriyanto, 2002: 1)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik itulah pemerintah Republik Indonesia melakukan Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan sistem akuntansi keuangan, pelaksanaan sistem ini tidak ada jaminan bahwa terdapat kesalahan atau penyimpangan sehingga diperlukan suatu metode pengawasan intern yang memadai dan dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi dan keabsahan pembelajaran dan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki system akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi keuangan tersebut hendaknya mendukung pada pencapaian. Karena penilaian Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari pencapaian kinerja pemerintah itu sendiri. Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan., akuntansi harus dipahami secara memadai oleh penyedia informasi keuangan (Sukmana dan Anggarsari, 2009).

Berdasarkan penjelasan latarbelakang dan penelitian yang sebelumnya diatas, maka penulis mengambil penelitian dengan **judul “PENGARUH PENGAWASAN, PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA UNIT SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH”** (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD) Se Ekskarisidenan Surakarta).

B. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan terhadap peningkatan kinerja unit satuan kerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Se Ekskarisidenan Surakarta.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah

Satuan kerja Pemerintah Daerah merupakan pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang kepala satker dan bertanggungjawab atas entitasnya. Satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah (Mardiasmo, 2006: 198). Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu (Mardiasmo, 2006: 25).

2. Pengertian Pengawasan

Hakikat Pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi (Sukmana dan Aggarsari, 2009).

3. Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem akuntansi keuangan adalah suatu sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas (Bastian dan Soepriyanto, 2002: 1-2).

4. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Adisasmita, 2011:35).

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian survey, yang meneliti sampel dari populasi dengan menggunakan data primer terhadap pegawai DPPKAD Se EksKarisidenan Surakarta. Data penting dari sampel suatu populasi dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner dilapangan.

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai DPPKAD Se Ekskarisidenan Surakarta.

Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai DPPKAD Se Ekskarisidenan Surakarta yang berkaitan langsung dengan aktivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria: 1) Pegawai Bidang Akuntansi., 2) Pegawai yang berpendidikan minimal SLTA, dan 3) Pegawai yang telah bekerja minimal 1 tahun.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan model kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

D. Variabel Penelitian dan Pengukuran

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Kinerja unit satuan kerja merupakan suatu tindakan-tindakan atau pelaksanaan tugas pemerintahan atau perusahaan yang telah diselesaikan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat diukur. Indikator kinerja yang digunakan adalah: (1) Pencapaian target kinerja

kegiatan dari suatu program, (2) Ketepatan dan kesesuaian hasil, (3) Tingkat pencapaian program, (4) Dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat, (5) Kesesuaian realisasi anggaran sesuai dengan anggaran, (6) Pencapaian efisiensi operasional dan moral perilaku pegawai. Herminingsih (2009).

2. Variabel Independen (X)

a. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merencanakan sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintah telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Indikator yang digunakan adalah : (1) Mengkaji sistem akuntansi dan pengendalian intern, (2) Pengujian atas pengelolaan keuangan dan operasi pemerintah, (3) Pengujian terhadap instrumen untuk menjaga harta, prosedur pemeriksaan yang tepat, standar operasional dan identifikasi keadaan yang tidak efisien, (4) Pengujian terhadap pengendalian non finansial organisasi. Novi andini (2012).

b. Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem akuntansi merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi tentang keuangan dalam suatu perusahaan atau instansi yang akan disajikan kepada pihak yang berkepentingan. Indikator yang digunakan adalah: (1) Kemudahan, (2) Kemanfaatan. Novi andini (2012)

c. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan,

pencatatan, dan pengawasan, serta pertanggungjawaban keluar masuknya uang atau dana organisasi. Indikator pengembangan karier yang digunakan adalah: (1) Planning, (2) Budget setting, (3) Activity of budget implemantation, (4) Budget monitoring. Natalia dewinda putri (2010).

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan uji instrumen penelitian (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedasitas), dan uji hipotesis (Analisis Regresi Linear Berganda, uji R^2 , Uji F, Uji t).

F. Hasil penelitian dan pembahasan

Hasil analisis data yang dilakukan dengan program SPSS 17.0 diperoleh sebagai berikut:

Variabel	Koefisien	t_{hitung}	Sig
Konstanta	3,818	0,913	0,365
Pengawasan	0,287	2,905	0,005
Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan	0,260	2,136	0,037
Pengelolaan Keuangan	0,204	2,120	0,038
F Statistik	12,918		
<i>Adjusted R²</i>	0,370		

Berdasarkan tabel IV.17 hasil uji regresi linear berganda diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KUSKPD = 3,818 + 0,287P + 0,260PSAK + 0,204PK + \varepsilon$$

Keterangan:

KUSKPD = kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah

A	= konstanta/ <i>intersept</i>
$\beta_{1,2,3}$	= koefisien regresi berganda antara x dan y
P	= pengawasan
PSAK	= pemahaman sistem akuntansi keuangan
PK	= pengelolaan keuangan
ε	= tingkat kesalahan atau tingkat gangguan (error)

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukan untuk variabel Variabel pengawasan diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,905 lebih besar dari t_{tabel} 2,000 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, berarti H_0 ditolak, yang artinya bahwa variabel pengawasan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah pegawai DPPKAD Se Ekskarisidenan Surakarta. Dengan adanya pengawasan keuangan yang baik dapat menekankan asumsi-asumsi penyimpangan perilaku dan sebagai prosedur yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta yang dimiliki pemerintah, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi dalam usaha dan membantu mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Tuasikal (2009) yang menyatakan bahwa pengawasan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah propinsi Maluku.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukan untuk variabel Variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,136 lebih besar dari t_{tabel} 2,000 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,037 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, berarti H_0 ditolak, yang artinya bahwa variabel pemahaman sistem akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah pegawai DPPKAD Se EksKarisidenan Surakarta. Dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah diharapkan para pengelola perlu memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem akuntansi daerah agar dapat menyajikan laporan

keuangan yang handal. Herbert el.al (1984 : 3 dalam Askam, 2009: 6). Hal ini mendukung penelitian Askam (2009) yang menyatakan bahwa pemahaman sistem akuntansi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah Propinsi Maluku.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukan untuk variabel Variabel pengelolaan keuangan diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,120 lebih besar dari t_{tabel} 2,000 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,038 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, berarti H_0 ditolak, yang artinya bahwa variabel pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah pegawai DPPKAD Se EksKarisidenan Surakarta. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pengawasan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah pegawai DPPKAD Se Ekskarisidenan Surakarta.
2. Variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah pegawai DPPKAD Se EksKarisidenan Surakarta.
3. Variabel pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah pegawai DPPKAD Se EksKarisidenan Surakarta.

H. Keterbatasan

1. Penelitian ini terbatas pada variabel pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan mempengaruhi kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah pegawai DPPKAD Se Ekskarisidenan Surakarta.
2. Penelitian ini terbatas pada daerah penelitian yaitu Se Ekskarisidenan Surakarta.
3. Keterbatasan sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan jumlah sampel sebanyak 62 responden.

I. Saran

Dari hasil penelitian ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya DPPKAD Se Ekskarisidenan Surakarta terus meningkatkan pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan agar hasil kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah pegawai DPPKAD Se Ekskarisidenan Surakarta dapat maksimal dan baik.
2. Sebaiknya untuk DPPKAD Se Ekskarisidenan Surakarta melakukan pengawasan dan pengelolaan keuangan secara tertib, dan transparan serta bertanggung jawab.
3. Penelitian mendatang wilayah penelitian tidak hanya wilayah Se-ekskarisidenan Surakarta saja dan menambah jumlah sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *“Pengelolaan Pendapatan Dan Anggran Daerah”*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Bastian, dan Soepriyanto. 2002. *“Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep Untuk Pemerintah Daerah”*. Salemba Empat: Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2007. *“Pengelolaan Keuangan Daerah”*. Indeks:Jakarta.
- Fachruzzaman, dan Norman. 2010. *“Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kota Bengkulu”*. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
- Ghozali, Imam. 2011. *“Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19”*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro:Semarang.
- Inawati, Endah. 2012. *“Pengaruh Pengawasan Terhadap Produktivitas kerja Pegawai Inspektorat kabupaten Tulungagung”*. Jurnal “OTONOMI”, Vol. 12, No.3. Juli.
- Indiantoro, Nur dan Bambang Supomo, 1999. *“Metodologi Penelitian Bisnis”*. BPFE: Yogyakarta.
- Jeddawi, Murtir. 2008. *“Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, Dan Pembinaan PNS”*. Kreasi Total Media: Yogyakarta.
- Mahsu, Sulistiyowati, Purwanugraha. 2006. *“Akuntansi Sektor Publik”*. BPFE: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *“Pengukuran Kinerja sektor Publik”*. BPFE: Yogyakarta.
- Mangkungara, A.A Anwar Prabu.2009. *“Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia definisi Kinerja Karyawan”*. Penerbit Rosda karya, Bandung.
- Nawawi, dan Martini. 2005. *“Penelitian Terapan”*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Nurlaela, dan Rahmawati. 2010. *“Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Subosukawonosraten”*. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.

- Republik Indonesia 2000. Peraturan pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Jakarta.
- Rohman, Abdul. 2007. *“Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan dan Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda Kota, Kabupaten, dan Provinsi di Jawa Tengah)”*. Jurnal MAKSI, Vol 7, no. 2:206-220. Agustus.
- Sukmawan, dan Anggarsari. 2009. *“Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya)”*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi unsil, vol.4, no. 1.
- Tuasikal, Askam. 2009. *”Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah”*. Universitas Pattimura Ambon. Vol. 10, No. Juni. Hlm. 66-88.